

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik

Oleh

ADEIRMA SURYANI SIREGAR
1520050006



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MEDAN**

ABSTRAK

**ADE IRMA SURYANI SIREGAR
1520050006**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan diukur dengan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah..

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Responden dalam penelitian ini 85 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuisioner. Data penelitian diolah dengan menggunakan SPSS. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah secara individual mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan. Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemanfaatan teknologi dan informasi, dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

**Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi,
Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah,
Nilai Informasi Laporan Keuangan**

**ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE VALUE OF THE
GOVERNMENT'S FINANCIAL REPORTING INFORMATION
THE AREA OF MEDAN CITY**

ABSTRACT

**ADE IRMA SURYANI SIREGAR
1520050006**

The purpose of this research is to analyze the factors that affect the value of financial reporting information. Factors that affect financial reporting information value is measured by the variable quality of human resources, utilization of technology and information, internal control systems, financial oversight areas..

The research approach used is associative. The respondents in this study 85 respondents. The sampling techniques used in this research is the saturated samples. Data collection is carried out by means of a detailed questionnaire. Research data was processed using SPSS. The research method used was multiple linear regression.

Human resources impact the value of the information financial statements. The utilization of information technology and the effect on the value of the information financial statements. The system of internal control to the value of the information financial statements. Financial oversight areas individually affects the value of the information financial statements. Human resources, internal control system technology and information utilization, and financial oversight areas simultaneously impact the value of financial report information

Keywords: human resources, utilization of technology and information, internal control Systems, Financial Oversight areas, the value of Financial report information

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dengan judul **“Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan “**.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu bagi penulis baik secara moril maupun materil. Terutama kepada Ayahanda Alm. Amir Syarifuddin Siregar S.E dan Ibunda Almh. Dra. Kartika Dewi yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada penulis, dan bantuan doa yang tulus kepada Allah SWT. Dan tak lupa terima kasih yang setulusnya kepada Adinda Dessy Meilisa Siregar dan Adinda Tri Abdul Haris Fadillah Siregar yang senantiasa memberikan motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana.
2. Bapak **Dr. Syaiful Bahri M. AP** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang senantiasa dengan sabar dan secara berkesinambungan meningkatkan layanan pendidikan di Pascasarjana Unieversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, Ak, QIA, CA., CPAI.**, selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Ibu **Hj. Hafsa SE, M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing II yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E .,M.Si., Ak., CA** selaku Sekretaris Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini dengan baik .
6. Bapak **Dr. Irfan, S.E., M.M** selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini dengan baik .
7. Ibu **Dahrani, S.E., M.Si** selaku Dosen Penguji III yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini dengan baik .

8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Bapak/Ibu selaku staf pegawai SKPD Kota Medan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.
11. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Program Pascasarjana Magister Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih perlu pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu akuntansi.

Medan, Maret 2019

Ade Irma Suryani Siregar
1520050006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Agency Teory	15
2.1.2. Nilai informasi laporan keuangan.....	18
2.1.3. Transparansi	23
2.1.4. Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	26
2.1.5. Nilai Informasi.....	27
2.1.6. Kualitas Sumber Daya Manusia	29
2.1.7. Teknologi Informasi	35
2.1.8. Keandalan dan Ketepatanwaktuan	35
2.1.9. Sistem Pengendalian Intern	35
2.1.10. Pengawasan Keuangan Daerah.....	37
2.2. Review Penelitian Terdahulu	40
2.3. Kerangka Konseptual	43
2.4. Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Pendekatan Penelitian	50
3.2. Lokasi Penelitian	50
3.3. Definisi Operasional.....	51
3.4. Populasi dan Sampel	54
3.5. Jenis Dan Sumber Data	55
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	55

3.7. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian	63
B. Pembahasan	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pemeriksaan LKPD Tahun 2014-2016	4
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	38
Tabel III.2	Definisi Operasional	41
Tabel III.3	Populasi Penelitian.....	45
Tabel III.4	Skala Pengukuran	47
Tabel IV.1	Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	64
Tabel IV.2	Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin	65
Tabel IV.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel IV.4	Tabulasi Jawaban Responden Sumber daya manusia.....	67
Tabel IV.5	Tabulasi Jawaban Responden Pemanfaatan teknologi informasi ..	69
Tabel IV.6	Tabulasi Jawaban Responden Sistem pengendalian intern.....	72
Tabel IV.7	Tabulasi Jawaban Responden Pengawasan Keuangan Daerah.....	76
Tabel IV.8	Tabulasi Jawaban Responden Nilai informasi laporan keuangan..	78
Tabel IV.9	Uji Validitas X1	81
Tabel IV.10	Tabel Uji Validitas X2.....	82
Tabel IV.11	Tabel Uji Validitas X3	83
Tabel IV.12	Tabel Uji Validitas X4.....	84
Tabel IV.13	Tabel Uji Validitas Y	85
Tabel IV.14	Uji Reliabilitas	85
Tabel IV.15	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	87
Tabel IV.16	Uji Multikolinearitas.....	89
Tabel IV.18	Regresi Berganda	91
Tabel IV.19	Uji t	93

Tabel IV.20 Uji F.....	94
Tabel IV.21 Koefisien Determinasi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	36
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan nilai informasi laporan keuangan publik. Nilai informasi laporan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Nilai informasi laporan keuangan dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Yusuf, 2015).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan nilai informasi laporan keuangan pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa nilai informasi laporan keuangan merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh

karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan nilai informasi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai subjek yaitu sumber daya manusia lah yang melakukan juga mengevaluasi dari hasil pengendalian internal yang telah dilakukan.

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel I.1
Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2014-2016

No	Kelompok Temuan	Nilai (juta Rp)
1	Kerugian Daerah	306.637,34
2	Potensi Kerugian Daerah	2.254.145,97

3	Kekurangan Penerimaan	497.789,35
4	Administrasi	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	71.263,02
6	Ketidakefisienan	9,82
7	Ketidakefektifan	420.458,85
	Jumlah	3.550.304,38

Sumber : SKPD Pemko Medan (2017)

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014-2016, dinyatakan bahwa terhadap LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2014 sampai tahun 2016 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun 2015 sebanyak 12 entitas, dan tahun 2016 sebanyak 14 entitas. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Terlambatnya LKPD yang disampaikan oleh pemerintah

daerah mengakibatkan BPK mengalami kesulitan dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 85 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai informasi laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan

2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh : 1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Warisno (2009), yang menemukan bukti bahwa tenaga keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tingkat SKPD di Provinsi Jambi masih kurang, sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Disamping itu, ada indikasi rendahnya kinerja SKPD yang dikarenakan rendahnya kualitas SDM dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003). Namun, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Selain itu, terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan teknologi informasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi perangkat keras dan

perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*).

Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), peneliti menambah satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pengawasan keuangan daerah. Sehingga, penelitian ini diberi judul : “Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD.
2. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun 2015 sebanyak 12 entitas, dan tahun 2016 sebanyak 14 entitas.
3. Masih ada beberapa tahun SKPD Pemko Medan Terlambat dalam melaporkan keuangan daerah kepada BPK.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

- b. untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
- c. untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
- d. untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
- e. untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Raya Puspita Sari Hasibuan pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

Mansur (2014) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat pengaruh secara simultan antara Pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas di dinas pemerintahan kabupaten Muaro Jambi digunakan secara optimal, dan penggunaan teknologi informasi yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal juga.

Indrawati (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), sistem pengendalian intern (X3) dan pengawasan keuangan daerah (X4) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Abdul Latif (2014) dengan hasil penelitian bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai

Thebora (2015) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota

Manado, Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), peneliti menambah satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pengawasan keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. *Agency Theory*

Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa pengertian nilai informasi laporan keuangan publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nilai informasi laporan keuangan publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (nilai informasi laporan keuangan vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (nilai informasi laporan keuangan horisontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa

ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

2. Nilai informasi laporan keuangan

a. Pengertian Nilai informasi laporan keuangan

Nilai informasi laporan keuangan merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Nilai informasi laporan keuangan publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Salim (2007: 16) Istilah nilai informasi laporan keuangan berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Nilai informasi laporan keuangan dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Nilai informasi laporan keuangan terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Pengertian nilai informasi laporan keuangan publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertngghungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ausaid (2001:6) Nilai informasi laporan keuangan merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. Nilai informasi laporan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik. Suatu nilai informasi laporan keuangan tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Nilai informasi laporan keuangan berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.

Menurut Toha (2007: 34) nilai informasi laporan keuangan ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin nilai informasi laporan keuangan pelayanan publik yang baik. Prinsip nilai informasi laporan keuangan adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip nilai informasi laporan keuangan

terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Menurut Dwiyanto (2005:147) mendefinisikan nilai informasi laporan keuangan adalah : Nilai informasi laporan keuangan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa nilai informasi laporan keuangan publik dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Nilai informasi laporan keuangan terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan mengukur perinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak dihadapan hukum telah diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

b. Pengukuran Nilai informasi laporan keuangan

Kumurotomo (2005: 15) indikator nilai informasi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1). *Exemplary leadership*, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan;

- 2). *Public Debate*, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal;
- 3). *Coordination*, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya nilai informasi laporan keuangan.
- 4). *Autonomy*, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi;
- 5). *Explicitness and clarity*, artinya standar karakteristik nilai informasi laporan keuangan harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus dinilai informasi laporan keuangannya.
- 6). *Legitimacy and acceptance*, tujuan dan makna nilai informasi laporan keuangan harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak;
- 7). *Negotiation*, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah;
- 8). *Educational campaign and publicity*, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan nilai informasi laporan keuangan yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh

ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut;

9). *Feed back and evaluation*, yaitu bahwa nilai informasi laporan keuangan harus terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima nilai informasi laporan keuangan serta dilakukan karakteristik perbaikannya.

10). *Adaption and recycling*, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam nilai informasi laporan keuangan. Sistem nilai informasi laporan keuangan harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan Menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yang dialihbahasakan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet (2004 :8) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator nilai informasi laporan keuangan yang perlu dikarakteristik yaitu :

1) Kemampuan Perencanaan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.

2) Kemampuan pengorganisasian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku pegawai.

3) Kemampuan kepemimpinan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses pemantauan nilai informasi laporan keuangan aktual, membandingkan actual dengan standar, dan membuat koreksinya jika perlu.

4) Kemampuan pengendalian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

c. Tujuan Nilai informasi laporan keuangan

Tujuan nilai informasi laporan keuangan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

Slamet (2005:6) menyatakan : Tujuan utama nilai informasi laporan keuangan adalah untuk mendorong terciptanya nilai informasi laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan nilai informasi laporan keuangan adalah menilai nilai informasi laporan keuangan pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan nilai informasi laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur nilai informasi laporan keuangan pemerintahan menurut Kemendiknas (2010:773) bahwa : Guna mengukur nilai informasi

laporan keuangan mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki nilai informasi laporan keuangan tinggi jika proses dan hasil nilai informasi laporan keuangan pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Slamet (2005:6) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan nilai informasi laporan keuangan:

- 1) Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang sistem nilai informasi laporan keuangan termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan nilai informasi laporan keuangan penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/stakeholders diawal setiap tahun anggaran.
- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran nilai informasi laporan keuangan pemerintahan dan disampaikan kepada stakeholders.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian nilai informasi laporan keuangan pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders dia akhir tahun.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- 7) Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8) Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai informasi laporan keuangan

Banyak faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi

(2005 : 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian nilai informasi laporan keuangan organisasi sebagai berikut :

- 1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai informasi laporan keuangan organisasi tersebut.
- 2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi ;
- 3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan ;
- 4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan seperti dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana alokasi anggaran.
- 5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi;
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Atmosoeparto (2005: 181) mengemukakan bahwa nilai informasi laporan keuangan organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1). Faktor eksternal, yang terdiri dari
 - a). Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - b). Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.

- c). Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan nilai informasi laporan keuangan organisasi.
- 2). Faktor internal, yang terdiri dari :
- a). Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - b). Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
 - c). Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - d). Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

3. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan nilai informasi laporan keuangan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,

dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1). Nilai informasi laporan keuangan

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2). Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3). Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4). Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Robbins, 2004). Menurut Pamudji (2006) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi,

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Siegel, 2003).

Sumber daya manusia adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian nilai informasi laporan keuangan departemen (Kenis, 2009). Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan nilai informasi laporan keuangan manajer. *Punitive approach* dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan sikap yang negatif, sedangkan *supportive approach* dapat mengakibatkan sikap dan perilaku yang positif (Kurnia, 2004).

Arifin (2007:27) evaluasi yang bersifat *punitive* dapat menyebabkan rendahnya motivasi, sebaliknya evaluasi yang bersifat *supportive* dapat menghasilkan sikap dan tingkah laku positif.

Munawar (2006) menjelaskan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

Menurut Ginting (2009 : 31), sumber daya manusia menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi nilai informasi laporan keuangan mereka .

Munawar (2006) menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh

terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat nilai informasi laporan keuangan mereka menjadi rendah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian nilai informasi laporan keuangan. Dimana apabila evaluasi yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan nilai informasi laporan keuangan manajemen.

b. Tujuan Sumber daya manusia

Evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu 1) meyakinkan bahwa nilai informasi laporan keuangan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai informasi laporan keuangan yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara nilai informasi laporan keuangan individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi nilai informasi laporan keuangan dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen (Kurnia, 2004).

Menurut Wahab (2002: 51) tujuan dari sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai nilai informasi laporan keuangan kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai nilai informasi laporan keuangan kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

c. Indikator Sumber Daya Manusia

Menurut Supriyono (2000:41) sumber daya manusia mempunyai beberapa macam fungsi antara lain untuk :

1) Fungsi Koordinasi

Sumber daya manusia berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari

kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

2) Fungsi Komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3) Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4) Fungsi Pengendalian

Sumber daya manusia dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan

pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5) Fungsi Pendidikan

Sumber daya manusia juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

6. **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Suyanto, 2005). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data,

pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Supriyono, 2000).

Indikator Teknologi Informasi

Menurut Nazaruddin (2008) untuk mengukur teknologi informasi adalah menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1. *Software* aplikasi
2. Proses akuntansi secara komputerisasi
3. *Software* sesuai peraturan perundangan
4. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
5. Pemeliharaan peralatan
6. Perbaikan peralatan yang rusak/usang
7. Terdapat antivirus

7. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2) Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Personel yang kompeten
- b. Pelimpahan tanggung jawab
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
- d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional

Menurut Wilkinson *et al.* , (2000) dalam Noviana (2015), indikator dari sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. *Standard Operating*
2. *Procedure (SOP)*
3. Pemisahan wewenang
4. Dokumen dan catatan yang memadai
5. Tindakan disiplin atas pelanggaran
6. Pembatasan akses

7. Langkah-langkah pencegahan kerusakan

8. **Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Indra (2009) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Peranan pengawasan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan kepada pegawai, karyawan, kenal keahlian dan keterampilan.
2. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga, supaya tercapai efisiensi perusahaan

3. Menilai hasil kerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan
4. Mencegah terjadinya penyelewengan
5. Kebersamaan administrasi secara menyeluruh.

Dalam kaitannya dengan nilai informasi laporan keuangan publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

- d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Indikator dari pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Evaluasi kegiatan
3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti
4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu
5. Dokumentasi bukti transaksi
6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas
7. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

B. Penelitian Terdahulu

Azhar (2007) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”, dengan variabel independen antara lain komitmen, sumber

daya manusia, perangkat pendukung, serta regulasi, sedangkan variabel dependen adalah keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sementara secara parsial, regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi, dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Secara parsial, hanya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda

SUBOSUKAWONOSRATEN)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dan nilai informasi laporan keuangan pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang

tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan

positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan

pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

5. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

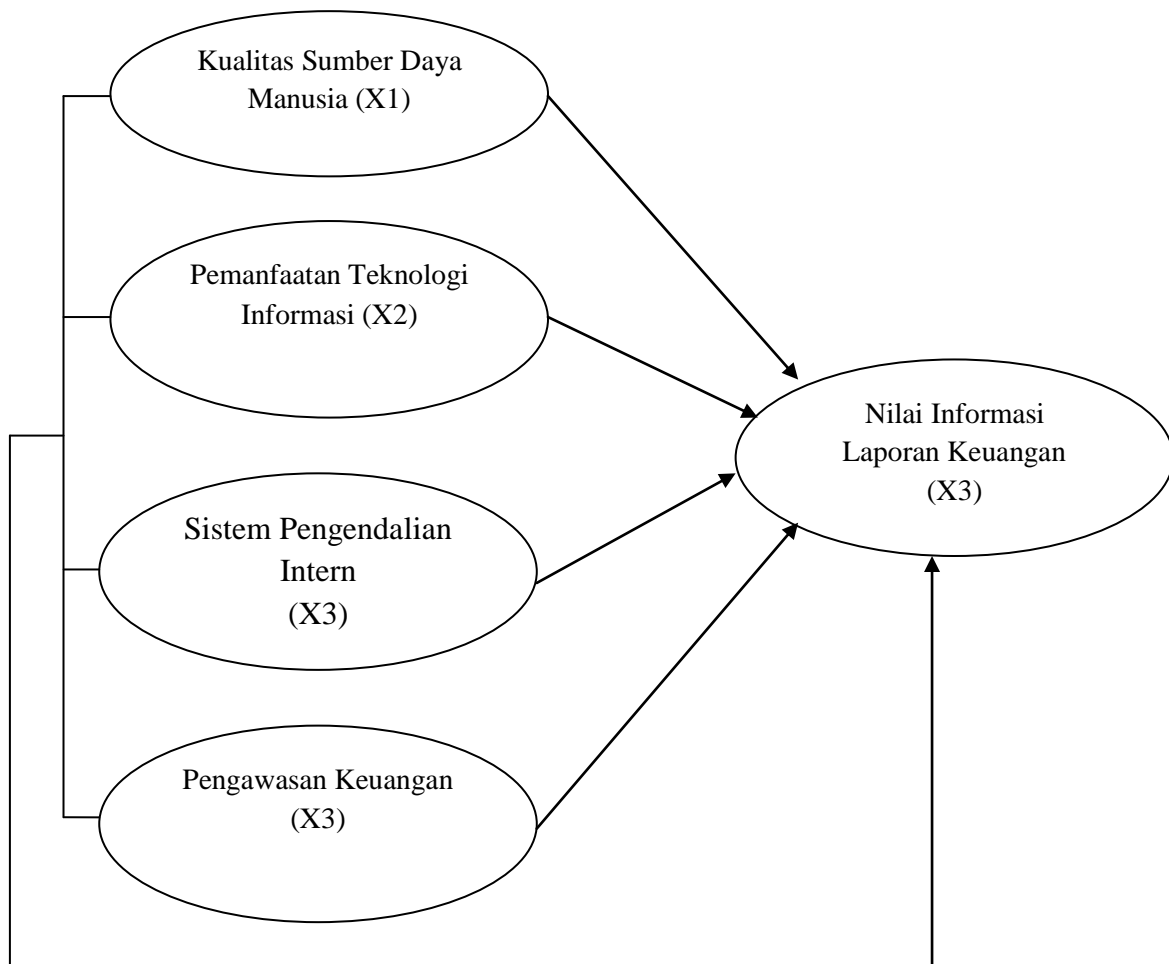
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang

memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan nilai informasi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar II.1

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, diidentifikasi variabel independen (X) yang diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pemikiran berikut.

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Nilai informasi laporan keuangan

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Nilai informasi laporan keuangan
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Nilai informasi laporan keuangan
4. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Nilai informasi laporan keuangan
5. Kualitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, Sistem pengendalian intern, Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap Nilai informasi laporan keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian asosiatif kuantitatif yang meneliti tentang pengaruh dan hubungan dari kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap informasi laporan keuangan daerah

B. Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Medan. Data dalam penelitian diperoleh dari informasi yang ada pada situs resmi SKPD Pemko Medan dengan alamat situs www.pemkomedan.co.id. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai hasil penelitian ini selesai.

Tabel III.1

Jadwal Pelaksanaan Proposal dan Tesis

NO	Kegiatan	2018-2019				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apri
1	Pengajuan Judul					
2	Survey Awal					
3	Bimbingan Proposal					
4	Sidang Kolokium					
5	Revisi Proposal					
6	Penelitian					
7	Bimbingan Tesis					
8	Seminar Hasil					
9	Ujian Tesis					

C. Definisi Operasional Variabel

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Keandalan yang merupakan variabel dependen adalah nilai informasi laporan keuangan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.* , 2000).

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010).

Adapun penjelasan mengenai dimensi variabel, indikator variabel, dan skala pengukuran dijelaskan pada tabel III.2 berikut.

Tabel III.2
Skala Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kualitas sumber daya manusia (X1)	1. Latar belakang pendidikan 2. Uraian peran dan fungsi 3. Peran dan tanggung jawab 4. Fungsi akuntansi 5. Sumber daya pendukung operasional 6. Pelatihan keahlian dalam tugas 7. SDM yang berkualitas	Skala interval
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	1. <i>Software</i> aplikasi 2. Proses akuntansi secara komputerisasi 3. <i>Software</i> sesuai peraturan perundangan 4. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi 5. Pemeliharaan peralatan 6. Perbaikan peralatan yang rusak/usang 7. Terdapat antivirus	Skala interval
3.	Sistem Pengendalian Intern (X3)	1. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) 2. Pemisahan wewenang 3. Dokumen dan catatan yang memadai	Skala interval

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Tindakan disiplin atas pelanggaran 5. Pembatasan akses 6. Langkah-langkah pencegahan kerusakan 	
4.	Pengawasan Keuangan Daerah (X4)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Evaluasi kegiatan 3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti 4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu 5. Dokumentasi bukti transaksi 6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas 7. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 	Skala interval
5.	Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transaksi keuangan yang jujur dan wajar 2. Neraca 3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD 4. Informasi dapat diuji 5. Rekonsiliasi secara periodik 6. Informasi untuk kebutuhan umum 7. Tersedianya informasi 8. Laporan yang sistematis 9. Penyampaian laporan yang teratur dan sistematis 	Skala interval

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dalam lingkup Pemerintahan Kota Medan yang terlibat dalam penyusunan anggaran dengan jumlah pegawai SKPD Dinas Daerah Kota medan sebanyak 17 Dinas yang terdiri atas

1. Dinas Pendidikan	5 orang
2. Dinas Kesehatan	5 orang
3. Dinas Perhubungan	5 orang
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5 orang
5. Dinas Kebudayaan dan pariwisata	5 orang
6. Dinas Bina Marga	5 orang
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman	5 orang
8. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan	5 orang
9. Dinas Pertamanan	5 orang
10. Dinas Kebersihan	5 orang
11. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	5 orang
12. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5 orang
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 orang
14. Dinas Pertanian dan Kelautan	5 orang
15. Dinas Pendapatan	5 orang

16. Dinas Pemuda dan Olah Raga	5 orang
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	5 orang
Jumlah	85 orang

Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (probability) dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 85 responden, metode pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi tidak mencapai seratus populasi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

1. Angket / Kuisisioner

Yaitu pernyataan-pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variable yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada pegawai atau responden ditempat

penelitian yaitu SKPD Kota Medan dengan subjek penelitian Seluruh pegawai SKPD Kota Medan. Pengumpulan data dalam instrument ini menggunakan angket (*Questioner*), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis dalam bentuk angket kepada responden untuk dijawabnya yang ditujukan kepada para karyawan SKPD Kota Medan dengan menggunakan *skala likert* dalam bentuk *checklist*, dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi sebagaimana terlihat pada table berikut ini :

Tabel III – 4 : Skala Pengukuran Likert

PERTANYAAN	BOBOT
Sangat setuju/SS	5
Setuju/ST	4
Kuang Setuju/KS	3
Tidak Setuju/TS	2
Sangat tidak setuju /STS	1

Sumber: Sugiyono (2013, hal.98)

Selanjutnya angket yang sudah diterima diuji dengan menggunakan validitas dan reliabilitas pertanyaan, yaitu :

a. Validitas Instrumen

1) Tujuan Melakukan Pengujian Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

2) Rumus Statistik untuk Pengujian Validitas

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2013, hal.267)

Dimana :

n = banyak nya pasangan pengamatan

x = Skor-skor item instrument variabel-variabel bebas.

y = Skor-skor item instrument variabel-variabel terikat.

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 16 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations*, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel.

3) Kriteria Pengujian Validitas Instrumen

Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dimana, $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0.05) = valid dan nilai sig (2tailed < 0,05 = valid)

Tabel III.
Uji Validitas X1

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,310 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,409 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,430 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,528 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,398 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,466 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,424 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,386 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 9	0,823 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 10	0,766 (positif)	0,196	Valid

Pernyataan 11	0,242 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 12	0,837 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 13	0,782 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 14	0,400 (positif)	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 14 pernyataan mengenai sumber daya manusia berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 14 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel III.9

Tabel Uji Validitas X2

Pernyataan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,352 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,314 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,459 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,410 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,483 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,359 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,479 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,293 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 9	0,456 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 10	0,329 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 11	0,584 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 12	0,594 (positif)	0,196	Valid

Pernyataan 13	0,445 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 14	0,459 (positif)	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 14 pernyataan mengenai pemanfaatan teknologi informasi berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 14 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel III.10

Tabel Uji Validitas X3

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,587 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,773 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,615 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,509 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,483 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,240 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,758 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,626 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 9	0,612 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 10	0,451 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 11	0,554 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 12	0,718 (positif)	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 12 pernyataan mengenai pengendalian intern berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 14 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel III.11

Tabel Uji Validitas X4

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,518 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 2	0,494 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 3	0,492 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 4	0,310 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 5	0,394 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 6	0,537 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 7	0,732 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 8	0,471 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 9	0,624 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 10	0,355 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 11	0,309 (positif)	0,196	Valid
Pernyataan 12	0,317 (positif)	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 12 pernyataan mengenai pengendalian intern berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 14 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel III.12

Tabel Uji Validitas Y

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,499 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 2	0,457 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 3	0,412 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 4	0,548 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 5	0,322 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 6	0,521 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 7	0,627 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 8	0,562 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 9	0,467 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 10	0,295 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 11	0,275 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 12	0,450 (positif)	0,338	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 12 pernyataan mengenai akuntabilitas kinerja berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

b. Reliabilitas Instrumen

1) Tujuan Melakukan Pengujian Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui reliabel atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Reliabel berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

2) Rumus Statistik untuk Pengujian Reliabilitas

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

(Sugiyono, 2013, hal.115)

Dimana :

ri = Reliabilitas internal seluruh instrument

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan ke dua.

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 16 dengan rumus scale, realibility analisys dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel.

3) Kriteria Pengujian Reliabilitas Instrumen

Kriteria pengujian reliabilitas menurut Ghozali (2016, hal.42) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas $> 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
- 2) Jika nilai koefisien reliabilitas $< 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik.

3) Tabel IV.13
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Sumber daya manusia	,736	14
TI	,758	14
SPI	,817	12
Pengawasan	,672	12
Nilai Informasi	,766	12

Sumber : Data diolah Dengan Menggunakan SPSS 24 (2019)

3.7 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Imam Ghozali (2006), statistic deskriptif dapat mendeskriptifkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Pengujian statistic deskriptif merupakan proses analisis yang merupakan proses menyeleksi data sehingga data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal.

2. Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0 *for Windows*. Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, dilakukan memprediksi variabel *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

α	:	Konstanta
β	:	Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel
Y	:	Nilai informasi laporan keuangan
X1	:	Sumber daya manusia
X2	:	Teknologi dan informasi
X3	:	Sistem pengendalian intern
X4	:	Pengawasan Laporan Keuangan
Y	:	Informasi laporan keuangan

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a) Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
- b) Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki angka VIF di sekitar 1, dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel lain.
- c) Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Pengujian Secara Parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas karakteristik manajemen dan sumber daya manusia. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut

1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan.

H_a : ada pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan.

2) Membandingkan hasil t_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $t_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a Ditolak

Jika $t_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak. Dan H_a Diterima

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t_{hitung}

r_{xy} = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

b. Pengujian Secara Simultan

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan.

H_a : ada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan.

2). Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{(1 - r^2) \int (n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2006: 212)

Dimana :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

N = sampel

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2012 : 277)

Keterangan:

D = Determinasi
R² = Nilai korelasi berganda
100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

SKPD dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks, maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah kota Medan, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi badan pengelolakeuangan daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan.

SKPD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan nilai informasi laporan keuangan, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

SKPD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang

prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

2. Karakteristik Responden

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 85 responden, tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Banyaknya pegawai yang bekerja di SKPD Pemko Medan, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden.

Data kuesioner yang disebarkan diperoleh beberapa karakteristik responden, yakni jenis usia, pendidikan dan pekerjaan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent
<25	0	0	0
25 – 30	40	47	47
> 35	45	53	53
Total	85	100	100

Sumber data : SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai SKPD Pemko Medan terdiri dari berbagai karakteristik usia yang berbeda-beda dari yang muda sampai yang tua. Hal ini berarti pegawai SKPD Pemko Medan didominasi satu karakteristik usia yaitu usia >35 tahun (78%) dan yang paling sedikit pegawai yang berusia 25-30 tahun (22%).

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent
Laki-Laki	68	80.0	80.0
Wanita	17	20.0	20.0
Total	85	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri wanita 17 orang (20%) dan laki-laki 68 orang (80%). Persentase pegawai SKPD Pemko Medan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan memiliki jumlah yang hampir sama banyaknya. Hal ini berarti karakteristik berdasarkan jenis kelamin pegawai didominasi jenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent
SMA	0	0	0

Diploma	5	6	6
S1	72	85	85
S2	8	9	9
Total	85	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 72 orang (85%) dan S2 sebanyak 8 orang (9%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai lebih banyak berpendidikan S1. Dan pegawai memiliki karakteristik pendidikan tinggi.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Variabel Sumber daya manusia

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 85 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah pegawai di SKPD Pemko Medan. Pada penelitian ini pula penulis menggunakan *questioner* sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna

Tabel 4.4
Tabulasi Jawaban Responden Sumber daya manusia

No pernya	Item Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Jumlah
-----------	-----------------	---------------	--------	---------------	--------------	---------------------	--------

Taan		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
		1	Pemeriksa minimal memiliki tingkat pendidikan formal Strata Satu (S1) atau setara	34	40	42	49	5	6	3	4	1	1
2	Penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan	21	25	32	38	24	28	7	8	1	1	85	100
3	Kualitas bagian keuangan yang menjalankan proses pemeriksaan adalah yang memiliki kemampuan dan kemahiran professional	12	14	34	40	28	33	10	12	1	1	85	100
4	Bagian keuangan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya	3	4	36	42	34	40	11	13	1	1	85	100
5	Jenis pelatihan yang diikuti pemeriksa harus berhubungan dengan objek pemeriksaan	9	11	51	60	18	21	7	8	0	0	85	100
6	Pelatihan baik dalam negeri maupun di luar negeri untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan auditor sangat diperlukan	29	34	40	47	15	18	1	1	0	0	85	100
7	Bagian keuangan yang menjalankan proses pemeriksaan harus mengutamakan keadilan	28	33	43	51	8	9	4	5	2	2	85	100
8	Perubahan peraturan perundang-undangan	37	44	42	49	6	7	0	0	0	0	85	100

	dalam pelaksanaan pengawasan langsung disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan daerah												
9	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umumdengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan	12	14	27	32	11	13	18	21	17	20	85	100
10	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan	1	1	36	42	13	15	18	21	17	20	85	100
11	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-Upgdrade pengetahuan saya dibidang akuntansi	24	28	54	64	7	8	0	0	0	0	85	100
12	Fasilitas yang disediakan sudah menunjang ASN dalam bekerja	5	6	38	45	7	8	28	33	7	8	85	100
13	Setiap ruangan kerja disetiap Dinas sudah lengkap dan memadai	1	1	36	42	13	15	28	33	7	8	85	100
14	ASN yang ditempatkan di Bagian Keuangan memiliki SDM yang berkualitas	36	42	44	52	5	6	0	0	0	0	85	100

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sumber daya manusia responden banyak yang menjawab setuju seperti pada pernyataan item 1 dan tujuh yang menyatakan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran sangat besar pengaruhnya terhadap sumber daya manusia artinya setiap pegawai wajib ikut dalam menyusun anggaran di SKPD Pemko Medan (Data terlampir).

a. Variabel Pemanfaatan teknologi dan informasi

Berikut adalah hasil jawaban responden pada variabel sasaran anggaran dengan jumlah sampel 85 pegawai yang ada di SKPD Pemko Medan :

Tabel 4.5
Tabulasi Jawaban Responden Pemanfaatan teknologi dan informasi

No pernyataan	Item Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
		1	Setiap Subbagian pada BPPKAD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas	27	32	55	65	3	4	0	0	0	0
2	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda	29	34	43	51	12	14	1	1	0	0	85	100
3	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.	33	39	42	49	6	7	4	5	0	0	85	100

4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	17	20	62	73	3	4	2	2	1	1	85	100
5	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	10	12	39	46	26	31	8	9	2	2	85	100
6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.	27	32	44	52	11	13	3	4	0	0	85	100
7	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.	34	40	45	53	4	5	2	2	0	0	85	100
8	Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.	22	26	28	33	27	32	7	8	1	1	85	100
9	Pusat informasi data menyediakan rincian data yang memadai sesuai dengan yang saya butuhkan dalam tugas-tugas saya	12	14	31	36	27	32	12	14	3	4	85	100
10	Komputer yang digunakan bebas	2	2	31	36	37	44	14	16	1	1	85	100

	dari dari segala gangguan seperti virus ataupun kinerjanya lambat													
11	Setiap SKPD memiliki software akuntansi untuk menyusun laporan keuangan	8	9	46	54	24	28	7	8	0	0	85	100	
12	Software yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan	40	47	43	51	2	2	0	0	0	0	85	100	
13	Dengan adanya komputer dapat mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi	29	34	43	51	12	14	1	1	0	0	85	100	
14	Dengan adanya software spesial akuntansi pemerintahan daerah dapat membantu menyusun laporan keuangan yang terintegrasi	33	39	42	49	6	7	4	5	0	0	85	100	

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan teknologi dan informasi responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga responden menjawab setuju. Dari jawaban responden maka dapat dilihat item pertanyaan

nomor 12 yang paling banyak responden menjawab setuju dengan pernyataan Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi artinya setiap perangkat daerah dalam penyusunan anggaran wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas agar dapat kejelasan anggaran yang akan digunakan (Data terlampir).

c. Variabel Sistem pengendalian intern

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Berikut adalah hasil jawaban responden mengenai sistem pengendalian intern yang ada di SKPD Pemko Medan :

Tabel 4.6
Tabulasi Jawaban Responden Sistem pengendalian intern

No	Item Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
		1	Pimpinan SKPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	21	25	47	55	14	16	2	2	1	1
2	SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk	30	35	41	48	9	11	5	6	0	0	85	100

	setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.												
3	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.	15	18	59	69	8	9	2	2	1	1	85	100
4	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.	15	18	44	52	19	22	4	5	3	4	85	100
5	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas	28	33	47	55	7	8	2	2	1	1	85	100
6	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas	22	26	40	47	18	21	4	5	1	1	85	100

	asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi												
7	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	31	36	35	41	11	13	7	8	1	1	85	100
8	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	14	16	59	69	6	7	5	6	1	1	85	100
9	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/revisi maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern	11	13	46	54	21	25	5	6	2	2	85	100

10	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan	30	35	43	51	9	11	3	4	0	0	85	100
11	Ditempat Saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab	19	22	52	61	12	14	1	1	1	1	85	100
12	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi	34	40	37	44	9	11	5	6	0	0	85	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian intern responden banyak yang menjawab setuju seperti pada item pernyataan nomor 2 dengan pernyataan Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya setiap realisasi anggaran yang digunakan maka harus sesuai dengan target yang sudah disusun agar dapat dievaluasi penggunaannya (Data terlampir).

d. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana

anggaran yang bertanggung jawab. Berikut adalah hasil jawaban responden mengenai Pengawasan keuangan daerah yang ada di SKPD Pemko Medan :

Tabel 4.7
Tabulasi Jawaban Responden Pengawasan Keuangan Daerah

No	Item Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Bapak/Ibu/Saudara melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan	13	15	56	66	11	13	2	2	3	4	85	100
2	Bapak/Ibu/Saudara melakukan pemeriksaan terhadap obyek pengawasan keuangan daerah secara terperinci	13	15	54	64	13	15	5	6	0	0	85	100
3	Bapak/Ibu/Saudara memberikan surat teguran/surat perintah penertiban kepada tiap dinas/instansi yang terbukti melakukan	17	20	52	61	14	16	2	2	0	0	85	100
4	Bapak/Ibu/Saudara melakukan Temu Akhir kepada pimpinan untuk melaporkan pelaksanaan pemeriksaan	8	9	54	64	21	25	2	2	0	0	85	100
5	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah	35	41	46	54	2	2	2	2	0	0	85	100

6	Bapak/Ibu/Saudara dalam setiap pemeriksaan, telah sesuai dengan anggaran dana biaya Pemeriksaan	22	26	31	36	23	27	8	9	1	1	85	100
7	Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan	13	15	33	39	22	26	13	15	4	5	85	100
8	Terdapat pengawasan represif yang dilakukan setelah rencana dilakukan	1	1	31	36	34	40	15	18	4	5	85	100
9	Terdapat pembinaan pengelolaan keuangan daerah	8	9	48	56	25	29	4	5	0	0	85	100
10	Terdapat evaluasi untuk perbaikan di masa datang	21	25	48	56	14	16	2	2	0	0	85	100
11	Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat Saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan	22	26	38	45	19	22	5	6	1	1	85	100
12	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus	33	39	36	42	13	15	2	2	1	1	85	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pengawasan responden banyak yang menjawab setuju seperti pada item pernyataan nomor 2 dengan pernyataan Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya setiap realisasi anggaran yang digunakan maka harus sesuai dengan target yang sudah disusun agar dapat dievaluasi penggunaannya (Data terlampir).

e. Variabel Nilai informasi laporan keuangan

Tabel 4.7
Tabulasi Jawaban Responden Nilai informasi laporan keuangan

No pernyataan	Item Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Informasi yang dihasilkan oleh SKPD tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan	19	22	46	54	14	16	4	5	2	2	85	100
2	Informasi yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja bebas dari kesalahan bersifat material	24	28	47	55	11	13	3	4	0	0	85	100
3	SKPD tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus	15	18	56	66	11	13	1	1	2	2	85	100
4	Informasi SKPD saya sajikan dalam laporan keuangan, telah teruji kebenarannya	17	20	49	58	13	15	4	5	2	2	85	100
5	Informasi yang dibutuhkan selalu tersedia ketika diminta	14	16	43	51	15	18	8	9	5	6	85	100
6	Laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, missal laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan	22	26	45	53	11	13	4	5	3	4	85	100

7	Laporan keuangan telah selesai dan disampaikan tepat setelah tahun anggaran berakhir	10	12	46	54	20	24	9	11	0	0	85	100
8	Laporan keuangan telah diserahkan paling lambat atau maksimal 2 bulan setelah anggaran berakhir	10	12	42	49	24	28	9	11	0	0	85	100
9	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami	12	14	51	60	16	19	5	6	1	1	85	100
10	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangantelah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	31	36	40	47	9	11	5	6	0	0	85	100
11	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat Saya bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu	35	41	42	49	5	6	3	4	0	0	85	100
12	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap	16	19	46	54	17	20	4	5	2	2	85	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel nilai informasi laporan keuangan responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan nilai informasi laporan keuangan yang dilakukan pemerintah sudah baik sehingga responden menjawab setuju dengan item pernyataan nomor 3 dengan pernyataan Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi hal ini menunjukkan di kantor SKPD Pemko Medan dalam penyusunan anggaran dan

penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi SKPD agar terciptanya nilai informasi laporan keuangan pemerintahan (Data terlampir).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel nilai informasi laporan keuangan yang diukur dengan kejujuran, proses, program, dan kebijakan responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan nilai informasi laporan keuangan yang dilakukan Polrestabes sudah baik sehingga responden menjawab setuju Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi hal ini menunjukkan di kantor SKPD Pemko Medan dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi SKPD Pemko Medan agar terciptanya nilai informasi laporan keuangan (Data terlampir). Data dari masing-masing variabel sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi dan informasi dan nilai informasi laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran II.

4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat dan disebarakan kepada 85 responden pada SKPD Pemko Medan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* $> 0,05$ (Hair, 1998).

5. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2013:100) Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk

menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Ghozali (2013:154) dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,
- 2) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

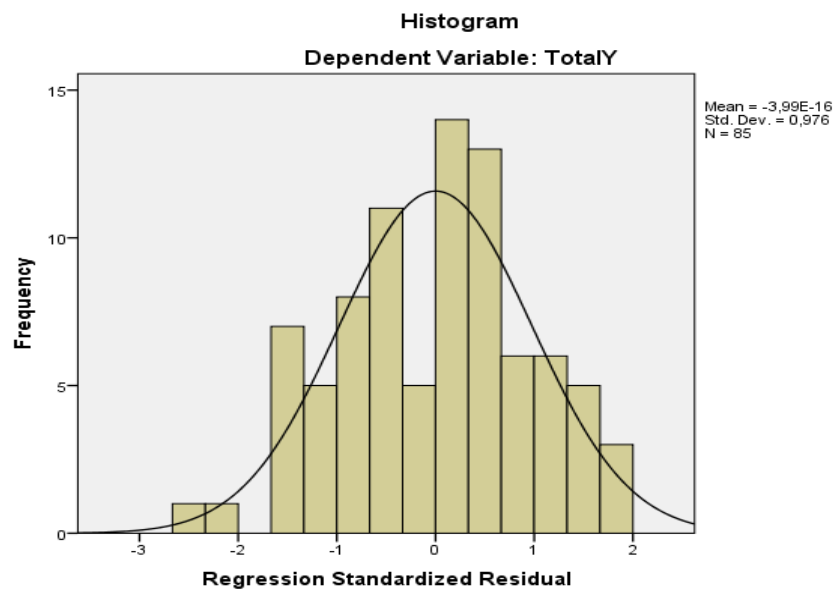
Tabel 4.15
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TotalX1	TotalX2	TotalX3	TotalX4	TotalY
N		85	85	85	85	85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,6857	3,9739	4,0010	3,8324	3,8922
	Std. Deviation	,40679	,31481	,47237	,37895	,35375

Most Extreme Differences	Absolute	,095	,102	,123	,096	,079
	Positive	,095	,051	,072	,065	,079
	Negative	-,066	-,102	-,123	-,096	-,079
Test Statistic		,095	,102	,123	,096	,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,563 ^c	,305 ^c	,297 ^c	,495 ^c	,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

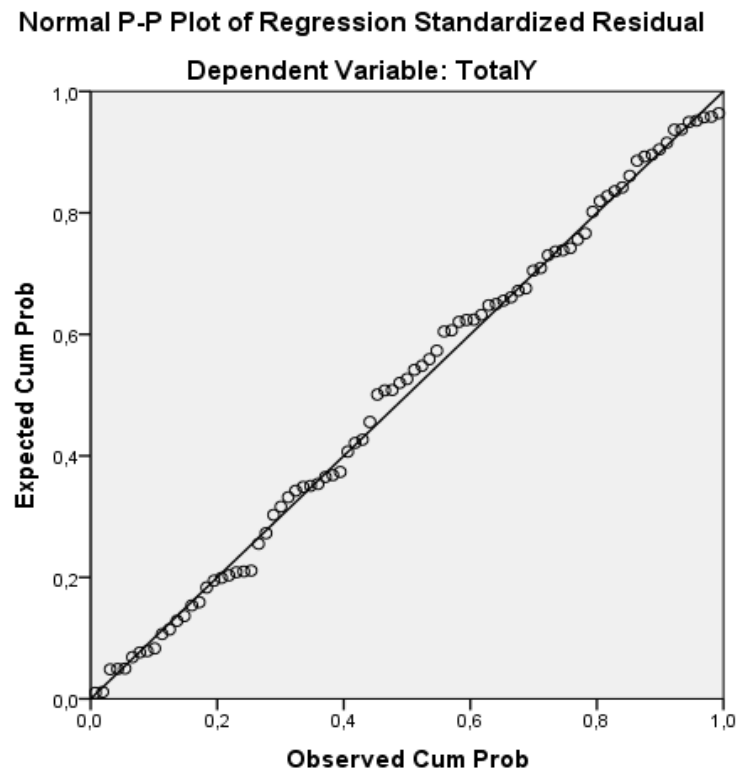
Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah sumber daya manusia (X1) 0.563, sistem pengendalian intern (X2) 0.305 , pemanfaatan teknologi dan informasi (X3) 0.297, pengawasan keuangan daerah (X4) 0,495 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.



Gambar 4.1

Histogram

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan.



Gambar 4.2

Grafik P-Plot

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolonearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih

dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance* > 0.10, dan nilai VIF < 5 (Ghozali, 2013 : 103).

Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.16
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,035	,619		8,128	,000		
	TotalX1	,356	,096	,409	3,370	,000	,968	1,033
	TotalX2	,209	,154	,186	3,358	,000	,968	1,033
	TotalX3	,432	,093	,058	4,463	,000	,968	1,033
	TotalX4	,593	,115	,099	4,808	,000	,968	1,033

a. Dependent Variable: TotalY

a Dependent Variable: nilai informasi laporan keuangan

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1.

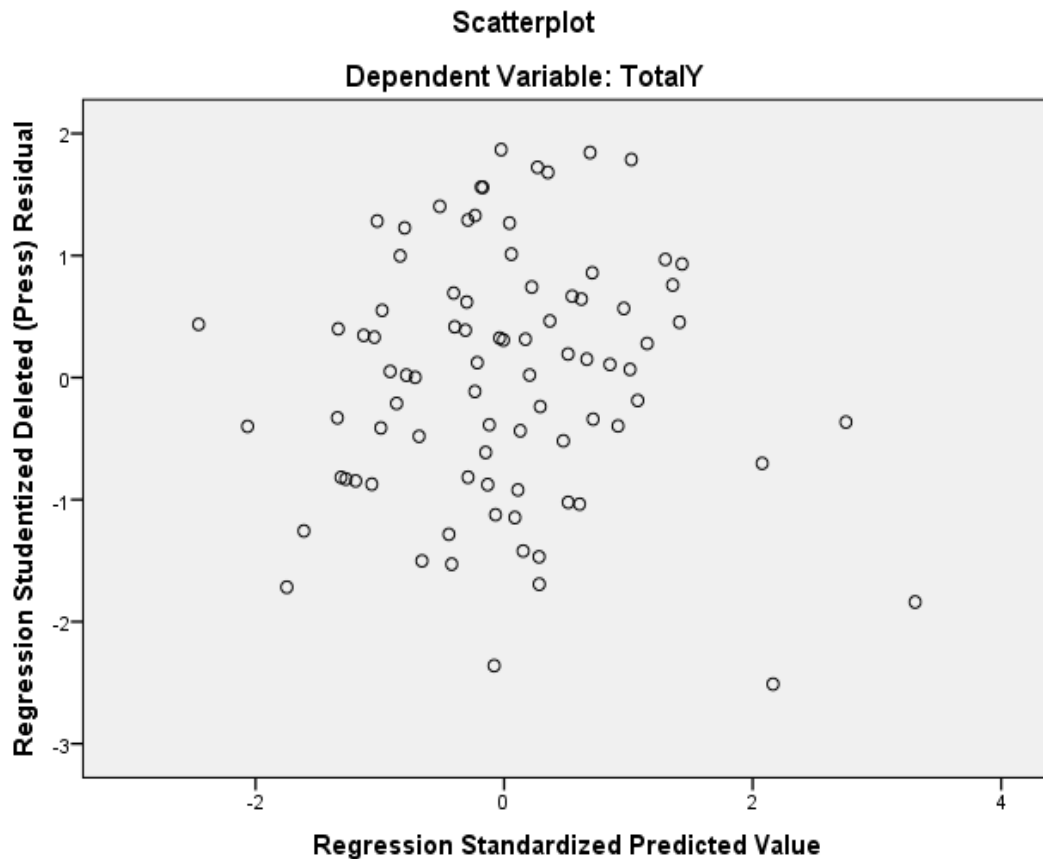
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi (Ghozali, 2013:134). Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada

membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.3

Scaterplot

6. Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Persamaan Regresi

Sugiyono (2013:298) Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh pengendalian internal, pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Coefficients

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,035	,619		8,128	,000		
	TotalX1	,356	,096	,409	3,370	,000	,968	1,033
	TotalX2	,209	,154	,186	3,358	,000	,968	1,033
	TotalX3	,432	,093	,058	4,463	,000	,968	1,033
	TotalX4	,593	,115	,099	4,808	,000	,968	1,033

a. Dependent Variable: TotalY

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 5,035 + 0,356X_1 + 0,209X_2 + 0,432X_3 + 0,593X_4$$

Keterangan:

1) konstanta sebesar 5,035 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0$, $X_2 = 0$, $X_3 = 0$) maka nilai nilai informasi laporan keuangan sebesar 5,035.

2) β_1 sebesar 0,356 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sumber daya manusia sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan nilai informasi laporan keuangan

sebesar 0,356 dengan asumsi variabel lain tetap.

- 3) β_2 sebesar 0,209 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sistem pengendalian intern sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,209 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) β_3 sebesar 0,432 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pemanfaatan teknologi dan informasi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,432 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 5) β_4 sebesar 0,593 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengawasan laporan keuangan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,432 dengan asumsi variabel lain tetap.

7. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Dengan criteria sebagai berikut :

- 1) Bila $\text{Sig} > 0.05$, maka $H_0 =$ diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila $\text{sig} < 0.05$, maka $H_0 =$ ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 3) Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka $H_0 =$ ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka $H_0 =$ diterima sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat.

Tabel 4.18

**Uji t
Coefficients^a**

--

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,035	,619		8,128	,000		
	TotalX1	,356	,096	,409	3,370	,000	,968	1,033
	TotalX2	,209	,154	,186	3,358	,000	,968	1,033
	TotalX3	,432	,093	,058	4,463	,000	,968	1,033
	TotalX4	,593	,115	,099	4,808	,000	,968	1,033

a. Dependent Variable: TotalY

Dari hasil penelitian ini variaebel independen yang terdiri dari :

1. Sumber daya manusia

Hipotesis : sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

$$t_{hitung} > t_{tabel} (3,370 > 1,988)$$

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$

Maka H0 ditolak sehingga sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

2. Sistem pengendalian intern

Hipotesis : sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

$$t_{hitung} > t_{tabel} (3,358 > 1,988)$$

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$

Maka H0 ditolak sehingga sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

3. Pemanfaatan teknologi dan informasi

Hipotesis : pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

$$t_{hitung} > t_{tabel} (4,463 > 1,988)$$

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$

Maka H0 ditolak sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi

berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

4. Pengawasan laporan keuangan

Hipotesis : pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan

$$t_{hitung} > t_{tabel} (4,808 > 1,988)$$

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$

Maka H_0 ditolak sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

b. Uji F

Untuk melihat pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi dan informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel4.19
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,584	4	,146	11,176	,000 ^b
	Residual	9,928	80	,124		
	Total	10,511	84			
a. Dependent Variable: TotalY						
b. Predictors: (Constant), TotalX4, TotalX3, TotalX1, TotalX2						

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 11,176 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,99 dengan signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi dan informasi secara simultan

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,176 > 2,99$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

c. Koefien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai R Square adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R Square semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R Square maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai R Square memiliki kelemahan yaitu nilai R Square akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.19
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
1	.635 ^a	.555	.483	1.35227

Adjusted R Square adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dari hasil penelitian nilai adjust R Square sebesar 0,483 berarti 48,3% sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan

teknologi dan informasi dan pengawasan laporan keuangan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan sementara sisanya 51,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sumber daya manusia Terhadap Nilai informasi laporan keuangan

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel sumber daya manusia sebesar 3,370 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,988, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,370 > 1,988$), maka sumber daya manusia menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pengaruh sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip nilai informasi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Dengan adanya sumber daya manusia dapat memungkinkan manajemen puncak untuk memahami masalah yang dihadapi oleh karyawan dan karyawan juga lebih dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh manajemen puncak. Sehingga anggaran partisipatif dapat meningkatkan komitmen para karyawan untuk mencapai tujuan anggaran.

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya nilai informasi laporan keuangan kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan nilai informasi laporan keuangan kinerja instansi pemerintah daerah bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis nilai informasi laporan keuangan diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan nilai informasi laporan keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pengaruh sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip nilai informasi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan judul Pengaruh Sumber daya manusia terhadap Nilai informasi laporan keuangan Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap Nilai informasi laporan keuangan Kinerja Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.

2. Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap Nilai informasi laporan keuangan

Sistem pengendalian intern memiliki t_{hitung} sebesar 3,358 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,988, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,358 > 1,988$), maka sistem pengendalian intern secara individual mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian nilai informasi laporan keuangan departemen.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pentingnya aspek sistem pengendalian intern diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan nilai informasi laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern adalah tindakan yang dilakukan untuk

menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian nilai informasi laporan keuangan departemen (Kenis, 2009). Pentingnya aspek sistem pengendalian intern diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pemerintah.

Tujuan dilakukannya sistem pengendalian intern adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya nilai informasi laporan keuangan dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan nilai informasi laporan keuangannya di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan nilai informasi laporan keuangan instansi pemerintah.

3. Pengaruh Pemanfaatan teknologi dan informasi Terhadap Nilai informasi laporan keuangan

Pemanfaatan teknologi dan informasi memiliki t_{hitung} sebesar 4,463 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,988, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,176 > 2,99 > 1,988$), maka pemanfaatan teknologi dan informasi secara individual mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan

Ha diterima, artinya pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi dan informasi akan membantu pegawai untuk mencapai nilai informasi laporan keuangan yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat nilai informasi laporan keuangan dapat tercapai

Abdullah (2005) menyatakan bahwa arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban atas “*where do we want to be*” dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pemanfaatan teknologi dan informasi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas ini, maka adanya kemudahan dalam mempertanggung jawabkan berhasil atau gagalnya pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan..

4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan

Pengawasan keuangan daerah memiliki t_{hitung} sebesar 4,808 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,988, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,808 > 1,988$), maka Pengawasan keuangan daerah secara individual mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata

kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

5. Pengaruh Sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern dan Pemanfaatan teknologi dan informasi Terhadap Nilai informasi laporan keuangan

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 47.817 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,99 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi dan informasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,176 > 2,99 > 2,99$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Penyusunan anggaran berbasis nilai informasi laporan keuangan bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis nilai informasi laporan keuangan tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan nilai informasi laporan keuangan manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis nilai informasi laporan keuangan memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan nilai informasi laporan keuangan organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*.

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah *mind set* tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. *Mind set* DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi *output base*, tidak lagi *input base*.

Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kota Medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah

penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama nilai informasi laporan keuangan adalah untuk mendorong terciptanya nilai informasi laporan keuangan setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pengaruh sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip nilai informasi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang lebih baik.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian nilai informasi laporan keuangan departemen.
3. Pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dan informasi akan membantu pegawai untuk mencapai nilai informasi laporan keuangan yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat nilai informasi laporan keuangan dapat tercapai.
4. Pengawasan keuangan daerah secara individual mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali

penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi

5. Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi dan informasi dan Pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Tujuan utama nilai informasi laporan keuangan adalah untuk mendorong terciptanya nilai informasi laporan keuangan setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang akan diberikan kepada instansi pemerintah SKPD Pemko Medan adalah sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah Kota Medan sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Medan sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah variabel – variabel lain seperti Kemampuan pengorganisasian, Kemampuan kepemimpinan, kemampuan pengendalian yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Latif. (2014). *Pengaruh Sumber daya manusia, Kejelasan Tujuan Dan Karakteristik Terhadap Nilai informasi laporan keuangan Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Al-Buhuts, Volume. 10 Nomor 1.
- Abdul Wahab, Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agus Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Barata Atep Adya
- Arifin. (2007). *Teori keuangan dan Pasar modal*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Atmosoeparto, Kisdarto, 2005. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ausaid (2001) *Intelektual Property Rights*. Asian Law Group
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Beny Arifin W. (2012) *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemanfaatan teknologi dan informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Nilai informasi laporan keuangan Nilai informasi laporan keuangan Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi
- Ghozali, Imam, (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Undip.
- Ginting, Ahyari. (2009). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta. BPFE.
- Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2000). *Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi terhadap Keefektifan Sumber daya manusia dalam Peningkatan Nilai informasi laporan keuangan Manajerial: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur*. Kelola. Yogyakarta.
- Kennis,I (2011)” *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*”. *The Accounting Review*: 707-721
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Nilai informasi laporan keuangan Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar

- Kurnia, Rahma, (2004), *Laporan Kegiatan Kursus identifikasi Dampak Lingkungan*, Jogjakarta, GEGAMA.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Miftah Thoha. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yusuf (2015) *Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Mulyadi, (2001), *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat
- Munawar, Indra. (2009). Hasil Belajar (Pengertian dan Definisi). <http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/hasil-belajar-pengertian-dandefinisi.html?m=1>
- Nafarin,M (2007) *Penganggaran Perusahaan*.Jakarta:Salemba Empat
- Nazaruddin (2008) *Penyusunan Anggaran Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Noviana. (2015). *Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Pamudji, S., (2006), *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Reni Yulianti (2008) *Pengaruh Pemanfaatan teknologi dan informasi, Kesulitan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Nilai informasi laporan keuangan Nilai informasi laporan keuangan Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter, (2004). “*Manajemen*”. Edisi ketujuh, diterjemahkan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet, Jakarta: Indeks
- Siegel G, and Marconi, H.R. (2003). *Behavioral Accounting*. South Western Publishing Co.
- Slamet Suyanto. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Sugiyono, (2013). “*Metode Penelitian Bisnis*”, *Cetakan kelima*, Bandung : Alfabeta.
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin (2006) *Pengaruh Pemanfaatan teknologi dan informasi Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. *Symposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Supriyono. 2000. *Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Yogyakarta : BPF.

Tuasikal, Askam, 2007, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol.08, No.01, Februari 2007.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah